

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*, Jakarta, Yudistira, 2007.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Gloria Madani Press, 2004.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007.

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994.

WJS. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.

Website :

<http://kamus.sabda.org/kamus/penertiban> diakses pada Selasa, 24 Mei 2016 pukul 13.10 WIB.

